



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LT. 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435 JKP 10024  
TELEPON (021)3849315; FAKSIMILE (021) 3847157; LAMAN [www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-984/AG/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Pelaksanaan Pelayanan yang Bersih dan  
Anti Korupsi

25 Mei 2018

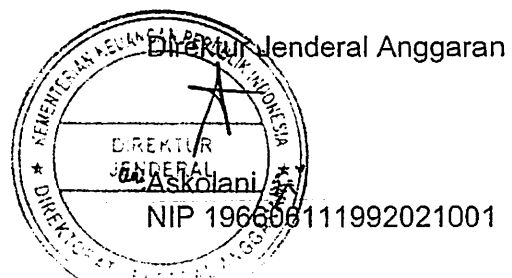
Yth . Daftar Terlampir

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mewujudkan layanan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan pelayanan prima kepada seluruh pihak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. DJA melaksanakan dan menegakkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
2. DJA memberikan pelayanan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. DJA memberikan pelayanan prima sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang berlaku, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta Kode Etik Pegawai.
4. DJA menjaga dan menghindari benturan kepentingan, gratifikasi, pungutan liar, praktik percaloan, dan diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Kami mohon bantuan/dukungan dari seluruh pihak, apabila ditemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan semangat anti korupsi dan pelayanan prima yang ditunjukkan oleh pejabat/pegawai DJA dalam pelaksanaan tugasnya, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat melaporkan kepada kami melalui sarana [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) dan/atau melalui surat elektronik [pengaduan.dja@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.dja@kemenkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
3. Seluruh Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

Lampiran:  
S-981/AG/2018  
Tanggal 25 Mei 2018

Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
15. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional;
17. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
19. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
20. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional;
21. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
22. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
23. Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
24. Deputi Bidang Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
25. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
26. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif;
27. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
28. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
29. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
30. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
35. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Nasional dan Kebudayaan;
36. Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
37. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
38. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
39. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
40. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional;
41. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
42. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
43. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
44. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
45. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;

46. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
47. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional;
48. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
49. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
50. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
51. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
52. Sekretaris Utama Arsip Nasional;
53. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
54. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
55. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
56. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
57. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
58. Sekretaris Jenderal Ombudsman;
59. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
60. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
61. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
62. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
63. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
64. Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan;
65. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
66. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
67. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara;
68. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
69. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
70. Asrena Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
71. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
72. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
73. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
74. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
75. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu;
76. Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
77. Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
78. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
79. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
80. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
81. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
82. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keamanan Laut;
83. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
84. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
85. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
86. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
87. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
88. Kepala Satuan Kerja Khusus Migas;
89. Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
90. Direktur Utama PT PLN (Persero);
91. Direktur Utama BPJS Kesehatan;
92. Direktur Utama, BPJS Ketenagakerjaan;
93. Direktur Utama PT Pos Indonesia;
94. Direktur Utama Perum BULOG;
95. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh;
96. Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia;
97. Direktur Utama, PT Taspen;
98. Direktur Utama, PT ASABRI;
99. Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia;

100. Direktur Utama Perum Jaminan Kredit Indonesia;
101. Direktur Keuangan PT AKR Corporindo;
102. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy;
103. Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero);
104. President Direktur Sarulla Operation Limited, Ltd;
105. President Direktur STAR Energy Geothermal Salak, Ltd;
106. President Direktur STAR Energy Geothermal Darajat, Ltd;
107. President Direktur STAR Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd;
108. Pesident Bali Energy, Ltd.